



Jangan Ada Jual Beli Lapak

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Harapannya, dengan kontrol ini, tidak terjadi praktik jual beli lapak.

"Setelah semua PKL menempati lapak barunya, Pemkot Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi. Termasuk praktik jual beli lapak yang dimungkinkan terjadi. Kami ada kontrol, memang sudah ada dikerjasama dengan pedagang. Kalau ada yang jual (lapak) nanti kami evaluasi terus.

* **Bersambung hal 7 kol 1**

Jangan

Semua itu untuk memastikan tidak boleh ada yang berpindah tangan, mengingat semua itu merupakan aset negara," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti, Senin (1/2).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkyatsiwi mengemukakan, upaya penataan PKL di kawasan Malioboro butuh proses yang bertahap. Sebelumnya Walikota Yogyakarta sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota yang intinya aktivitas berjualan sudah tidak diperbolehkan di sepanjang Malioboro. Namun gerobaknya masih diperbolehkan berada di sana sampai dipindahkan secara bertahap hingga selesai.

"Semuanya ini berproses dan diatur untuk pemindahannya. Totalnya ada sekitar 1.836 PKL baik di Teras 1 maupun Teras 2 sehingga perlu pengaturan supaya tidak crowded. Ada yang sudah buka di depan, jadi saya berharap komitmen dan dukungan dari masyarakat terhadap penataan PKL yang menjadi bagian revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro," ujarnya.

Siwi menyebut revitalisasi kawasan semi pedestrian Malioboro ini pada intinya bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengundian dan penempatan lapak tersebut pun di-

serahkan kepada paguyuban komunitas PKL sendiri yang bisa ditempati dan sudah tidak boleh berjualan lagi di sepanjang Malioboro mulai 1 Februari 2022.

Pihaknya pun menyiapkan tim yang akan memberikan pemahaman dan pendekatan kepada PKL yang masih berjualan di sepanjang Malioboro.

Sementara itu, puluhan pendorong gerobak di Kawasan Malioboro terancam kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena, PKL saat ini tidak lagi membutuhkan jasa antar-jemput gerobak di tempat berjualan yang baru. Mereka, Senin (31/1) mendatangi kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan meminta kejelasan nasib.

Ketua Paguyuban Pendorong Gerobak Malioboro,

Kuat Suparjono mengatakan, sedikitnya ada 53 pendorong gerobak yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan dan meminta solusi dari Pemda. Para pendorong gerobak mengaku belum siap menerima dampak dari relokasi PKL ke lokasi baru. Pasalnya, mereka membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan lain, mengingat rencana pemerintah merelokasi pedagang dinilai mendadak. **(Ria/Ira) -d**

Sambungan hal 1

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005